

No. **178** Desember 2020 - Januari 2021

www.baktinews.bakti.or.id

BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA

**MELAWAN TRADISI
“CULIK PEREMPUAN” DI SUMBA**

**PEREMPUAN MAMPU,
INDONESIA MAJU!**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTINews Desember 2020 - Januari 2021 No. 178

- 1** Membangun Indonesia dari Desa
Oleh **ITA IBNU**
- 6** Bappenas dan Peran *Clearing House*
Oleh **A.M. SALLATU**
- 9** Koperasi Mata Mosobu, Koperasi Perempuan di Buton
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 13** Pengakhiran Program MAMPU: Perempuan Mampu, Indonesia Maju!
Oleh **ITA IBNU**
- 19** Tradisi "Culik Perempuan" di Sumba Bagian I
Oleh **MARTHA HEBI**
- 24** Melibatkan Masyarakat & Unit Layanan Dasar Dalam Perencanaan Kampung
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 29** 5 Cara Membuat *Slideshow* Video Yang Keren Dan Informatif
Oleh **RIESTY WULANDARI**
- 31** Nama Program Akan Berbeda Tetapi Nama Anak Akan Terus Ada
Oleh **JIMMY YIKWA**
- 33** Ekologi Terjaga Warga Sejahtera dari Hutan Desa Labbo
Oleh **WAHYU CHANDRA**
- 37** Tantangan Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 di Tengah Pandemi Covid-19
Oleh **LATWARNINGRUM ALFIANI YULITA**
- 40** Diskusi *Online Live* di Instagram Story @infobakti
- 41** Batukarinfo.com

■ Ilustrasi Cover : **Hariandi Hafid/Yayasan BaKTI**



KELUARGA BESAR
YAYASAN BaKTI
MENGUCAPKAN

*Selamat
Hari Natal*

DAN

**Tahun Baru
2021**

Membangun Indonesia dari Desa

Oleh **ITA IBNU**



Sebagai salah satu negara yang berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan SDGs (*Sustainable Development Goals*), Indonesia menempatkan SDGs sebagai arus utama segenap pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Komitmen ini dituangkan dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*) mengukur seluruh aspek pembangunan sehingga mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Berbagai rencana aksi nasional, provinsi hingga kabupaten termasuk kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi membentuk pusat studi pembangunan berkelanjutan. Swasta mengarahkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi.

Bagaimana dengan peran desa dalam SDGs, sebagai entitas terdepan dalam segala proses pembangunan nasional? Desa berkontribusi 74% terhadap pencapaian SDGs nasional. Dari Aspek kewilayahan, 91% wilayah pemerintahan berupa desa sehingga pengelolaannya akan memenuhi tujuan energi bersih, pertumbuhan ekonomi, produksi, dan konsumsi. Tujuan berikutnya ialah pemerataan wilayah, infrastruktur, permukiman, tanggap perubahan iklim,



lingkungan darat, lingkungan laut, perdamaian, dan kemitraan pembangunan. Dari Aspek kewargaan, 188 juta warga desa merupakan 43% penduduk Indonesia sehingga pemenuhan kebutuhan mereka menyumbang bagi tujuan pengakhiran kemiskinan dan kelaparan, akses kesehatan, air bersih, dan pendidikan, serta kesetaraan gender.

Tanpa menekankan peran desa, capaian SDGs Indonesia cenderung lambat, ranking Indonesia dalam pencapaian SDGs pada saat



Foto : Adwiti Pramono/Nayasan BAKTI

baseline 2016 berada pada urutan 98 dari 149 negara di dunia dan pada tahun 2020 berada pada urutan 101 dari 166 negara di dunia. Agar SDGs Nasional dapat terwujud, SDGs Nasional diturunkan menjadi SDGs Desa. SDGs Desa diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024. SDGs Desa ini sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional. Dengan narasi pembangunan sampai ke desa dengan

pendekatan *people centered development*, membangun kelompok-kelompok masyarakat di lapangan, pembangunan langsung masuk ke desa. Keleluasaan diberikan kepada pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi faktual di desa. SDGs global dan SDGs nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal dan adat istiadat di desa. Untuk itu dalam SDGs Desa ditambah satu poin yang mengatur tentang kearifan lokal, agar pemerintah desa membangun desanya sesuai



Foto : Adwit Pramono/Yayasan BaKTI

Tanpa menekankan peran desa, capaian SDGs Indonesia cenderung lambat, ranking Indonesia dalam pencapaian SDGs pada saat *baseline* 2016 berada pada urutan 98 dari 149 negara di dunia dan pada tahun 2020 berada pada urutan 101 dari 166 negara di dunia.

dengan kearifan lokal yang ada. Adapun 18 SDGs Desa yang sudah ditetapkan yaitu: 1) Desa Tanpa Kemiskinan, 2) Desa Tanpa Kelaparan, 3) Desa Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Desa Berkualitas, 5) Keterlibatan Perempuan Desa, 6) Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, 7) Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, 8) Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, 9) Infrastruktur dan Ekonomi Desa Sesuai Kebutuhan, 10) Desa Tanpa Kesenjangan, 11) Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman, 12) Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, 13) Desa Tanggap Perubahan Iklim, 14) Desa Peduli Lingkungan Laut, 15) Desa Peduli Lingkungan Darat, 16) Desa Damai Berkeadilan, 17) Kemitraan untuk Pembangunan Desa, 18) Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Besarnya kontribusi dan peran yang dijalankan oleh desa, pada September 2020 lalu pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Permendesa PDTT No 13/2020 yang berfokus pada SDGs Desa. Permendesa ini sekaligus menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes tahun 2021. Tiga poin yang menjadi fokus utama dalam prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 antara lain, pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Hal tersebut terkait dengan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma; penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDesma. Kedua, program prioritas nasional sesuai



Foto : Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

kewenangan desa, diantaranya terkait dengan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; selain itu, pengembangan Desa Wisata; penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa serta terkait dengan desa inklusif. Fokus ketiga berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini yaitu adaptasi kebiasaan baru mengenai Desa Aman COVID-19.

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Kondisi perekonomian desa selama beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adalah produk/komoditas unggulan desa belum dapat dipasarkan dengan baik dipicu oleh rendahnya skala ekonomi, produksi petani dalam skala kecil. Produksi dalam skala kecil menyebabkan distribusi yang panjang untuk mengakses ke pasar ataupun industri, terakhir paska panen. Mengapa paska panen? Jika selama ini kita disibukkan bagaimana memproduksi hasil panen sebanyak-banyaknya, belum menaruh perhatian untuk mengolah komoditas paska panen.

Pemerintah daerah harus menaruh perhatian serius pada sistem logistik. Karena produksinya kecil-kecil sehingga tidak dapat mengakses tol laut. Akibatnya para petani bergantung kepada tengkulak untuk memasarkan produknya. Di sinilah diperlukan peran BUMDes, koperasi desa, agar dapat melakukan konsolidasi terhadap komoditas pertanian, nelayan, pengrajin, perkebunan, dan lain sebagainya. Apabila ini dapat dikonsolidasikan, maka dapat mengakses tol laut. Walaupun tidak semua daerah memiliki fasilitas tol laut.

Isu lainnya mengenai tol laut adalah muatan balik, kontainer barang dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur selalu penuh, tetapi sebaliknya selalu kosong. Jadi apabila kita lihat, banyak komoditas di Indonesia Timur yang menjadi tidak ada harganya, tidak mampu berkompetisi. Di sinilah peran pemerintah, dalam hal ini Dinas perlu menciptakan iklim yang mendukung pemasaran produk. Apabila tidak ada intervensi, maka yang terjadi adalah daya beli masyarakat tidak meningkat karena pendapatan mereka tidak bertambah. Jika tidak ada daya beli, maka

tidak ada dorongan permintaan barang dan jasa. Untuk itu, pemerintah seharusnya dapat berinvestasi, menciptakan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, terciptanya pendapatan, yang dapat mendorong daya beli masyarakat. Dibutuhkan peran dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan pihak terkait lainnya untuk melakukan konsolidasi terhadap pemasaran produk komoditas. Sehingga potensi-potensi desa dapat dikelola dan dipasarkan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Samsul Widodo, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, PDT dalam Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI dan Bappeda Kabupaten Mitra Yayasan BaKTI di KTI yang mengangkat tema Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 PERMENDESA PD TT No. 13/2020 – SDGs Desa, yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom 21 Oktober 2020 lalu.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2019 menegaskan bahwa: 1) Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah, 2) Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus. Jika selama ini Dana Desa cenderung berisi laporan pelaksanaan kegiatan, pembangunan infrastruktur. Dengan hadirnya Permendes ini, desa memiliki kewenangan untuk memilih prioritas pencapaian tujuan SDGs yang ingin dicapai. Desa menetapkan kriteria-kriteria mengenai target yang ingin dicapai, desa dapat membuat program-program terkait padat karya tunai yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru di desa. Dana Desa melalui BUMDes dapat digunakan untuk mendirikan unit usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, dengan terbitnya Permendes PD TT Nomor 13 tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa akan memudahkan intervensi lembaga dan swasta untuk menyalurkan bantuannya, mengingat petanya cukup jelas.

Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa yang mendukung SDGs Desa.

Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
- Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di desa;
- Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Diperlukan kolaborasi multipihak untuk menguatkan desa dengan prinsip “*No One Left Behind*” semua harus berpartisipasi. Bukan hanya pemerintah, pemerintah desa, tapi seluruh *stakeholders*, akademisi, swasta, dan lain-lain.

“Desa sebagai kumpulan orang-orang yang sering ditinggalkan *left behind* yang seharusnya menuntun ke atas, SDGs sebagai suatu paradigma yang holistik, seluruh masyarakat desa dan pemerintah desa sejatinya mengetahui persis arah dan tujuan pembangunan desa. Kolaborasi semua pihak terkait termasuk sektor swasta menjadi sebuah peluang yang harus dimanfaatkan oleh desa, karena membangun desa berarti membangun Indonesia”, ucap Ibu Erna Witoelar, Dewan Pembina Yayasan BaKTI dan pernah menjadi Duta Besar Khusus untuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Asia Pasifik dalam sambutan penutup pada pertemuan ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Forum Kepala Bappeda provinsi se-KTI, Anda dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto: Dok. Humas Bappenas

Bappenas dan Peran *Clearing House*

Oleh **A.M. SALLATU**

Berita utama yang dimuat Kompas (28/10/20) tentang peran Bappenas sebagai *clearing house*. Diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas saat memantau upaya percepatan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Setidaknya, istilah *clearing house* merupakan inovasi peran yang sementara diemban Bappenas saat ini. Suatu istilah yang lazimnya digunakan oleh institusi keuangan.

Dengan istilah tersebut, yang dimaksudkan adalah peran Bappenas dalam hal melakukan konvergensi perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan di daerah yang dipandang memiliki kontribusi langsung pada substansi kepentingan pembangunan nasional. Hal ini memang menarik karena berarti daerah (provinsi

Diakui atau tidak, sejauh ini instansi dan berikut aparat perencana di daerah semacam kehilangan jati dirinya, sehingga sulit sekali mengembangkan kurva belajar, karena terlalu bersifat mekanistik.

dan melibatkan serta mengintegrasikan sejumlah kabupaten/kota di wilayahnya) berinisiatif dan berprakarsa dalam program pembangunannya yang menyorot sasaran dan kepentingan pembangunan nasional, untuk itu pemerintah (Bappenas) patut mencermati dan memberi dukungan terutama pendanaan untuk mencapai kinerjanya.

Keperluan pembangunan nasional yang dicermati di Jawa Barat bagian selatan, meliputi strategi penanggulangan kemiskinan, keterisolasian, penanganan bencana serta pengembangan ekonomi (UMKM), disamping proyek-proyek berskala nasional seperti jalan tol, jalur kereta api, *Geopark* Pelabuhan Ratu, pengembangan industri kecil menengah, korporasi petani dan monogram desa yang merupakan *piloting* nasional. Oleh karena itu, Bappenas perlu berada di wilayah tersebut selama sepekan. Program dan kegiatan pembangunan tersebut dikongkresikan perencanaan dan penganggarnya untuk tiga tahun ke depan. Menariknya lagi, oleh karena disisihkan waktu untuk bisa berdiskusi bersama warga masyarakat. Peran *clearing house* ini telah dilakukan di beberapa provinsi dan terus akan dilakukan hingga menjangkau 34 provinsi di tanah air. Kongkresi seperti ini betul-betul merupakan praktik baru dalam perencanaan

pembangunan di tanah air. Bappenas yang turun ke daerah.

Terlihat bahwa inisiatif dan prakarsa pembangunan yang datang dari bawah, secara *bottom-up*, bisa langsung disikapi dalam kerangka pembangunan nasional. Dengan meletakkan provinsi dalam mengintegrasikan pembangunan di wilayahnya, akan mewujudkan provinsi sebagai suatu kesatuan wilayah pembangunan, terutama untuk menyorot isu dan kepentingan pembangunan nasional. Dari pengalaman di Jawa Barat ini, nampak bahwa sejumlah teori dan konsep berpikir dalam perencanaan pembangunan daerah akan mampu diaplikasikan secara baik. Setidaknya, untuk kegiatan yang terkait kepentingan pembangunan nasional, pada skala provinsi tidak lagi sekedar sekumpulan proyek melainkan telah diintegrasikan dalam pencapaian kinerjanya. Diharapkan bahwa praktik kongkresi yang sama bisa juga diaplikasikan oleh setiap provinsi dalam upaya mencapai sasaran pembangunan provinsi dan tidak lagi melihat daerah kabupaten dan kota di wilayahnya secara sendiri-sendiri.

Setidaknya tiga hal menarik dalam kaitan proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang dipraktikkan selama ini. Pertama, ritual proses perencanaan melalui Musrenbang, di satu sisi bisa disederhanakan dan lebih fokus, dan di lain pihak dapat mengurangi sifat birokratis dari perencanaan itu sendiri. Kedua, dapat merelaksasi pedoman penyusunan perencanaan sebagaimana yang selalu ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan nyaris setiap tahun diterbitkan. Ketiga, sejatinya dapat mengembalikannya esensi program pembangunan yang memang harus bersifat tahun ganda (*multi years*).

Bila semangat kongkresi perencanaan dan penganggaran seperti ini dapat terus berjalan dan secara berjenjang di semua lapisan pemerintahan. Sehingga maruah perencanaan

pembangunan melalui substansi program yang mampu dirumuskan, akan berkembang sebagaimana seharusnya. Selama ini baik proses maupun substansi perencanaan pembangunan yang dihasilkan lebih banyak bernuansa pendiktean belaka. Diakui atau tidak, sejauh ini instansi dan berikut aparat perencana di daerah semacam kehilangan jati dirinya, sehingga sulit sekali mengembangkan kurva belajar, karena terlalu bersifat mekanistik.

Tantangannya ke depan adalah seperti apa sepatutnya pembangunan daerah itu dicermati? Belajar dari apa yang dicontohkan di Jawa Barat bagian selatan di atas, konvergensi perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan relatif sederhana, oleh karena nyaris sepenuhnya berwawasan sektoral atau pembangunan yang bersifat sektoral. Memang seperti itulah wawasan pembangunan nasional, yang mengedepankan wawasan sektoral. Tetapi di daerah sifatnya lebih kompleks, oleh karena pembangunan sektoral yang berhasil sekalipun, belum tentu akan menjamin bahwa sesuatu daerah sebagai suatu wilayah akan berkembang. Merumuskan perencanaan pembangunan daerah sepatutnya didasarkan pada wawasan pengembangan wilayah. Yaitu menemukan sejak pada tahap awal perencanaannya, bagaimana menjamin wilayahnya akan berkembang, barulah kemudian memikirkan pembangunan sektor atau sektoral apa yang akan mendukungnya. Tidak terbalik, seperti yang terjadi pada nyaris semua rumusan perencanaan pembangunan daerah selama ini. Seakan meyakini asumsi bahwa apabila sektor berkembang maka wilayah pun akan otomatis berkembang. Pada kenyataannya, meletakkan sektor atau sektoral di depan dalam pembangunan daerah, lebih banyak menghasilkan ketimpangan yang multidimensi, pemanfaatan sumber daya pembangunan secara tidak optimal, dan sejumlah dampak negatif lainnya. Secara umum yang bisa dihasilkan

adalah sekadar pertumbuhan, itupun terperangkap pada kondisi yang senantiasa fluktuatif, bukan makna pembangunan sesuai esensinya, terutama dalam memperkuat struktur pembangunan itu sendiri.

Sedikit ataupun banyak, kepentingan pembangunan nasional sepatutnya dapat dibedakan dengan kepentingan pembangunan daerah yang esensi adalah pengembangan wilayah. Bahkan ada kalimat yang secara tegas membedakannya, bahwa apa yang baik dan benar pada kepentingan pembangunan nasional, belum tentu baik dan benar untuk kepentingan pembangunan daerah. Dapat diduga bahwa penggunaan istilah konvergensi adalah juga dapat bermakna mengharmonisasikan kepentingan pembangunan. Oleh karena secara pasti hanya daerah itu sendiri yang paling tahu yang terbaik bagi daerahnya, dan apa yang mampu dikontribusikan pada pembangunan nasional. Karena itu pada dasarnya, pengembangan wilayah adalah juga merupakan kepentingan pembangunan nasional, dan konvergensi sebagaimana yang dipraktikkan menjadi sesuatu niscaya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan praktik konvergensi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Bappenas saat ini, daerah ditantang dan dituntut untuk mampu mengetengahkan kerangka pengembangan wilayahnya. Apalagi bila di dalam kerangka pengembangan tersebut sejumlah kepentingan pembangunan nasional dapat dihadirkan. Semoga apa yang menjadi inovasi Bappenas dalam praktik perencanaan pembangunan saat ini, dapat menghasilkan suatu mozaik pembangunan yang harmonis antara nasional dan daerah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI) dan dapat dihubungi melalui email madjid76@gmail.com



Foto : Dok. Koperasi Mata Mosobu

Koperasi Mata Mosobu, Koperasi Perempuan di Buton

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

D

esa Poogalampa adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Batagau, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Rata-rata mata pencaharian penduduk desa ini adalah nelayan dan petani.

Di masa pandemi ini, warga tetap berkegiatan. Mereka tetap ke laut dan ke kebun, tetap membawa pulang ikan dan juga hasil bercocok tanam untuk dikonsumsi keluarga dan dijual. Namun seiring pandemi yang merebak sejak bulan Februari lalu, pendapatan para nelayan dan petani ini pun menurun. Pasar sepi dan daya beli pun menurun, akibatnya pendapatan dari penjualan hasil tangkapan dan hasil kebun ikut berkurang drastis.

Hingga kini, masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani dan nelayan merasakan dampak positif yakni mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi, usaha kecil seperti warung kelontong semakin meningkat dan rumah-rumah anggota juga semakin bagus karena telah direnovasi dengan pinjaman dana dari koperasi.

Di desa ini terdapat koperasi yang diberi nama BUKP (Bina Usaha Kelompok Produktif) Mata Mosobu. Koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh ibu-ibu di Desa Poogalampa. Di awal berdirinya koperasi ini, Mata Mosobu hanyalah sebuah kelompok arisan keluarga di Desa Poogalampa. Pada tahun 1994, Lembaga SINTESA memberikan bantuan sebesar 1,5 juta rupiah sebagai modal awal. Bermula dari bantuan inilah, anggota arisan bersepakat membentuk BUKP (Bina Usaha Kelompok Produktif) Mata Mosobu dengan jenis usaha simpan pinjam, yang bertujuan mengajak masyarakat untuk mengelola keuangan rumah tangganya secara baik dan proporsional.

Di awal pembentukan 26 tahun lalu, para anggota menerapkan aturan yang disepakati bersama, yakni untuk menjadi anggota, setiap orang wajib menyetor simpanan pokok sebesar 25 ribu rupiah dan menyetor simpanan wajib setiap bulan sebesar seribu rupiah. Nilai yang sangat kecil namun punya pengaruh besar dikemudian hari. Selain simpanan wajib, anggota juga disarankan untuk menabung dalam bentuk simpanan sukarela yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh koperasi untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan sebagai modal usaha atau kebutuhan pokok lainnya dengan persyaratan yang mudah dan tanpa agunan dengan suku bunga dua persen setiap bulan.

Jika di awal koperasi Mata Mosobu mendapat bantuan modal awal dari SINTESA dan beberapa kali mendapatkan bantuan modal lagi dalam perjalanannya, kini koperasi

yang dikenal juga dengan sebutan koperasi perempuan ini telah mengelola murni dana swadaya masyarakat tanpa bantuan modal dari manapun. Hingga akhir tahun 2019 jumlah dana yang dikelola telah mencapai kurang lebih 1 miliar rupiah.

Perkembangan dan keberhasilan Koperasi Mata Mosobu memengaruhi kesejahteraan anggotanya. Berbeda dengan koperasi pada umumnya, koperasi ini melayani pinjaman untuk kebutuhan produktif dan konsumtif anggotanya dimana komposisinya adalah 50 persen untuk biaya pendidikan, 30 persen untuk modal usaha dan 20 persen untuk biaya perbaikan tempat tinggal. Untuk biaya pendidikan, koperasi tidak membatasi jumlah pinjaman. Namun, pengurus memberi pengarahan agar uang pinjaman digunakan dengan baik.

Hingga kini, masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani dan nelayan merasakan dampak positif yakni mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi, usaha kecil seperti warung kelontong semakin meningkat dan rumah-rumah anggota juga semakin bagus karena telah direnovasi dengan pinjaman dana dari koperasi.

Jumlah anggota pada awal koperasi Mata Mosobu berdiri hanya 16 orang saja. Kini koperasi Mata Mosobu telah beranggotakan 156 orang, 6 di antaranya adalah laki-laki. Seluruh anggota ini memercayakan dana mereka untuk disimpan dan dikelola oleh koperasi. Tidak ada penambahan anggota lagi, bukan karena tidak ada pendaftar lagi namun pengurus sengaja membatasi agar lebih mudah dalam hal manajemennya.

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua yakni Ibu Wa Ode Sabaria, serta Sekretaris, Bendahara



dan bagian administrasi keuangan. Tingkat pendidikan mereka hanya SMP, Ibu Wa Ode Sabaria saja yang tamatan SMA. Namun hal ini tidak mengurangi semangat dan keinginan mereka mengelola dana miliaran yang dipercayakan anggota kepada mereka.

Di tahun-tahun sebelumnya, dana yang dikelola pernah mencapai kurang lebih 2,2 miliar rupiah. Di akhir tahun 2019 jumlah dana yang dikelola sebesar 1 miliar rupiah. Di masa pandemi ini dana tersebut berkurang. Hal ini karena banyak dari anggota menarik simpanan sukarela mereka untuk menutupi kekurangan pendapatan yang diakibatkan dampak pandemi ini.

Namun hal ini dianggap oleh ibu Wa Ode Sabaria sebagai salah satu indikator bahwa menjadi anggota koperasi sangat dirasakan manfaatnya terlebih di masa pandemi ini. Anggota tetap bisa membayar biaya sekolah anak dan kebutuhan lainnya dari dana simpanan tersebut.

Di masa pandemi ini, selain simpanan sukarela yang berkurang karena ditarik anggota, pandemi juga berdampak pada kemampuan mengembalikan angsuran kredit dari anggota. Terkadang pembayaran angsuran molor 3 minggu dari jadwal yang disepakati. Namun hal ini tidak terlalu dipermasalahkan pengurus karena koperasi ini hadir memang untuk membantu anggotanya terlebih di masa sulit ini.

Untuk suku bunga, *rate* yang disepakati adalah 1 persen untuk bunga simpanan sukarela dan 2 persen untuk bunga pinjaman. Di masa pandemi ini, pengurus sedang meninjau apakah perlu ada penyesuaian namun karena menghindari adanya penarikan secara masif dari anggota, maka suku bunga tersebut masih diberlakukan sambil tetap memantau perkembangan.

Pada tahun 2010, Koperasi Mata Mosobu terpilih menjadi salah satu praktik cerdas yang



Foto-foto : Dok. Koperasi Mata Mosobu

didokumentasikan dan dipromosikan Yayasan BaKTI di panggung Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke-V di Ambon. Yayasan BaKTI percaya bahwa praktik cerdas yang sedang dilakukan oleh Mata Mosobu adalah kisah inspiratif yang layak disebarluaskan agar mampu menjadi inspirasi bagi banyak pihak khususnya di KTI.

Banyak hal yang telah terjadi dan berlangsung setelah 10 tahun tampil di panggung Festival Forum KTI. Tampilnya pengurus Koperasi Mata Mosobu pada Forum KTI di Ambon tahun 2010 lalu menambah semangat dan kepercayaan diri mereka dalam mengembangkan koperasi. Dalam beberapa kali kegiatan, seperti rapat tahunan pemerintah kabupaten juga dilibatkan. Pengurus koperasi juga pernah diundang sebagai narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Bappeda Kabupaten Buton, hingga menjadi koperasi percontohan.

Banyak rencana yang telah disiapkan pengurus koperasi di awal tahun ini diantaranya

adalah menyediakan bahan bangunan yang dapat dibeli langsung anggota di koperasi mengingat selama ini tingginya permohonan pinjaman untuk kebutuhan pembangunan atau renovasi rumah. Namun rencana unit usaha penjualan bahan bangunan ini harus ditunda seiring merebaknya pandemi. Kegiatan lain yang direncanakan adalah pengembangan keterampilan usaha rumah tangga di tingkat anggota, serta memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah.

Berbagai penyesuaian dilakukan pengurus untuk tetap bertahan untuk tetap memberikan layanan kepada anggota dalam melalui masa sulit ini. Rencana-rencana tetap disusun untuk kemudian dapat diimplementasikan pada saat pandemi telah berlalu.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Praktik Cerdas BaKTI, Anda dapat menghubungi info@bakti.or.id



Pengakhiran Program MAMPU

Perempuan Mampu INDONESIA MAJU !

Oleh **ITA IBNU**

J

alan mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia masih menemui beberapa tantangan, diantaranya dapat dilihat pada tingkat partisipasi politik dan kesempatan berkontribusi aktif dalam pembangunan yang disebabkan salah satunya karena adanya nilai-nilai patriarki dan konstruksi sosial di masyarakat. Indeks Pembangunan Gender atau IPG di tahun 2010 sebesar 89,42 meningkat menjadi sebesar 90,99 di tahun 2018, walau terjadi peningkatan namun hal ini mengindikasikan masih terjadinya kesenjangan gender pada hasil pembangunan dan memperlihatkan progres yang sangat lambat. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2010 sebesar 68,15 dan meningkat menjadi 72,10 di tahun 2018, dengan progres kenaikan sebesar 3,95 ini menunjukkan belum maksimalnya peran perempuan dalam pembangunan politik dan ekonomi. Menurut *Gender Equality Index* yang dikeluarkan oleh

UNDP, Indonesia berada pada tingkat 103 dari 162 negara atau terendah ketiga se ASEAN.

Berbagai data di atas menunjukkan realita yang ada di lapangan di mana perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga keterwakilan dalam politik. Upaya pemerintah untuk menanggulangi hal ini akan lebih optimal dengan dukungan berbagai unsur masyarakat. Kehadiran Program MAMPU sebagai gerak dan upaya bersama mendorong tercapainya kesetaraan gender yang selama 8 tahun terakhir telah digelorakan sebagai perjuangan memberdayakan perempuan. Sejak 2012, Program MAMPU telah mendukung organisasi masyarakat sipil dan organisasi yang tertarik pada isu gender untuk berkoalisi dengan masyarakat, eksekutif, legislatif dan sektor swasta untuk mendorong perubahan berbasis bukti.

MAMPU adalah kemitraan Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS), yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah, dan mendukung pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait. Bagi Program MAMPU, pemberdayaan perempuan adalah tujuan sekaligus cara untuk mencapai tujuan tersebut.

MAMPU menjangkau perempuan yang terpinggirkan dengan bekerja bersama organisasi masyarakat sipil sebagai Mitra MAMPU, untuk memberdayakan perempuan dan memengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat daerah dan nasional. MAMPU memperkuat kapasitas mitra, memperluas jaringan mereka dan menghubungkan mereka dengan pemangku kepentingan strategis dan pembuat kebijakan. Mitra MAMPU mengadvokasi perubahan, yang secara langsung mendukung komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengembangkan sejumlah 'model' dan pendekatan yang menjanjikan.

Tahun ini menandai selesainya Program MAMPU, banyak capaian dan perubahan telah diraih baik di tingkat komunitas, daerah, maupun nasional. Hasil ini telah membawa perubahan positif di mana kapasitas, suara dan pengaruh perempuan, serta akses mereka ke layanan masyarakat meningkat. Sekretariat

Program MAMPU bersama seluruh mitra nasional dan daerah mengadakan konferensi penutupan Program MAMPU untuk menampilkan dan merayakan pencapaian utama Program.

Konferensi pengakhiran Program MAMPU dilaksanakan secara virtual via Zoom selama dua hari di tanggal 8-9 Oktober lalu, mengumpulkan para aktor pelaku perubahan dalam pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender, terutama dalam mempersiapkan dan membangun jaringan mitra, meningkatkan suara dan pengaruh mereka terhadap kebijakan strategis, dan membuka akses yang lebih besar ke layanan bagi perempuan, terutama perempuan miskin dan kelompok rentan lainnya.



Kate Shanahan

Team Leader
Program MAMPU

Dalam sambutan yang disampaikan oleh *Team Leader* Program MAMPU, Kate Shanahan menyampaikan bahwa Program MAMPU telah bekerja sama dengan 13 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di tingkat nasional, 100 mitra lokal di 1000 desa. Menjangkau 27 provinsi, 147 kabupaten/kota dengan 3 fokus besar yaitu: kapasitas dan kesiapan untuk hasil kolektif untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Sistem informasi MAMPU berhasil mengumpulkan lebih dari 600 cerita perubahan perempuan di 132 kabupaten/kota, baik perubahan di tingkat Individu maupun tingkat komunitas.

Dalam perjalanan 8 tahun, Program MAMPU dan para mitra telah membentuk lebih dari 3000 kelompok lokal di tingkat desa. Pada periode 2017-2020. MAMPU telah berkontribusi terhadap 702 keputusan kebijakan di tingkat lokal dan nasional diantaranya undang-undang baru dalam meningkatkan perlindungan pekerja migran serta Undang-Undang Perkawinan tahun 74 yang bersejarah terjadi perubahan di tahun 2019 untuk batas usia perkawinan perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini disampaikan dalam sambutan Allaster Cox Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia.



Allaster Cox
Wakil Duta Besar
Australia untuk
Indonesia

“Kami percaya bahwa kesetaraan gender akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada hasil pembangunan yang lebih baik. Ketika perempuan memiliki kesempatan yang sama dan mempunyai posisi dalam pengambilan keputusan mereka memberikan keragaman ide, ini dapat meningkatkan produktivitas. Harapan kami, kerja sama ini dapat terus berlanjut dalam agenda penting bersama tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berikutnya.” Ungkap Allester Cox diakhir sambutannya.

Berbagai kegiatan dalam Program MAMPU tentunya telah menghasilkan produk pengetahuan pembelajaran dan praktik baik yang membawa perubahan dan dampak positif di berbagai tingkatan baik individu, masyarakat pemerintah desa dan pemerintah daerah. Pengelolaan pengetahuan dari produk-produk yang dihasilkan oleh Pogram MAMPU sangat penting. Data dan informasi pendekatan yang inovatif, praktik baik dan berbagai pembelajaran yang telah dihasilkan MAMPU dapat menjadi aset yang sangat berharga.

Dalam konferensi ini, seluruh mitra Program MAMPU berkesempatan untuk berbagi pengalaman, cerita menginspirasi, pembelajaran serta capaian yang telah diperoleh ke dalam beberapa sesi dialog.



Misiyah
Direktur
Kapal Perempuan

Perjalanan MAMPU dalam Meningkatkan Kapasitas dan Kesiapan Organisasi Perempuan Akar Rumput

Ibu Misiyah, Direktur Kapal Perempuan berbagi cerita mengenai keberhasilan Sekolah Perempuan sebagai salah satu model pemberdayaan

perempuan khususnya perempuan di akar rumput yang bertujuan memperkuat kesadaran kritis, kepekaan, membangun solidaritas dan komitmen untuk melakukan perubahan. Sejumlah capaian telah diraih diantaranya data gender yang digunakan sebagai penyusunan kebijakan, berhasil mendorong 146 kebijakan di tingkat desa dan kabupaten untuk isu-isu perkawinan anak, KDRT, dan perlindungan sosial.



Dina Lumbantobing
Koordinator
Konsorsium Perempuan

Ibu Dina Lumbantobing, Koordinator Konsorsium Perempuan, mengangkat pendekatan penguatan ekonomi sebagai salah satu upaya menghentikan pemiskinan perempuan yang dapat mendorong pemberdayaan perempuan melalui Credit Union. Credit Union (CU) bukan semata-mata penguatan ekonomi, namun menjadi penguatan politik perempuan akar rumput. Jumlah saham Credit Union saat ini sebesar 64,6 miliar, dengan 589 kelompok dan beranggotakan 23.610 orang. Kelompok-kelompok ini diberi pendidikan politik sehingga beberapa dari mereka berani maju untuk pemilihan kepala desa, menjadi panitia pemilihan, wakil di DPRD, anggota DPD.



Rusdiana
Direktur Eksekutif
BITRA

Isu pekerja rumahan menjadi fokus yang dikerjakan oleh BITRA dan Yasanti, Ibu Rusdiana (Direktur Eksekutif BITRA) menyampaikan BITRA dengan dukungan Program MAMPU membentuk Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) untuk menyuarakan aspirasi pekerja rumahan yang akan menguatkan pengaruh pekerja rumahan di tingkat daerah maupun nasional. Saat ini BITRA memiliki anggota sebanyak 6 ribu orang yang tersebar di 7



Amin Muftiyah
Direktur Yasanti

provinsi yaitu Sumut, DIY, DKI, Banten, Jateng dan Jatim. Senada dengan BITRA, Yasanti juga melakukan pengorganisasian pekerja rumahan di Jawa Tengah dan DIY, sebagian besar dari pekerja rumahan ini adalah mantan pekerja industri, karena faktor keluarga mengundurkan diri dan menjadi pekerja rumahan. Memfasilitasi terbentuknya serikat, melakukan pengorganisasian, penyadaran pendataan, pengkajian permasalahan terutama tidak adanya hubungan kerja yang jelas.



M. Yusran Laitupa
Direktur Eksekutif
Yayasan BaKTI

Memperkuat Suara dan Pengaruh: Perempuan Mentransformasi Narasi Pemberdayaan

Yayasan BaKTI yang diwakili oleh Muhammad Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI berkesempatan berbagi pengalaman upaya BaKTI memperkenalkan metode Reses Partisipatif bagi Anggota DPRD. Reses Partisipatif adalah metode reses yang partisipatif dan berperspektif gender. Penggunaan istilah 'partisipatif' pada Reses Partisipatif merujuk pada metode, peserta, dan tempat. Dengan demikian, Reses Partisipatif menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*Focus Group Discussion/FGD*). Dalam Reses Partisipatif, penting untuk memastikan peserta mewakili sebanyak-banyaknya unsur dalam masyarakat, dilaksanakan di tempat yang nyaman dan suasana yang tidak formal. Reses Partisipatif menjadi salah satu instrumen yang sangat efektif untuk menjalankan fungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan. Melalui pendampingan yang dilakukan BaKTI kepada para anggota DPRD telah memfasilitasi terbitnya

7 Peraturan Daerah perlindungan anak dan perempuan dan Perda tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.



Lily Danes
Sekretaris Jenderal
Komnas Perempuan

Lily Danes, Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan mengangkat tantangan dan harapan dalam mendorong RUU PKS. Tantangan utama bagaimana menerjemahkan pengetahuan dan pengalaman korban kekerasan seksual menjadi kebijakan, komitmen politik yang sangat bergantung pada dinamika, basis data yang harus diperkuat dan sulitnya menjaga energi gerakan juga adalah tantangan berikutnya. Terakhir adanya harapan yang datang dari tokoh agama untuk mendiskusikan diskursus kitab yang menopang atau inisiatif dari para seniman merupakan energi baru bagi gerakan.



Wahyu Susilo
Direktur Migrant Care

“Migrant Care yang berfokus pada upaya mengadvokasi para buruh Migran dengan mendorong perbaikan undang-undang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Migrant Care juga menggandeng organisasi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri untuk terus menyuarakan bagaimana urgensi pembaharuan undang-undang lama”, Ungkap Wahyu Susilo, Direktur Migrant Care.

Bersama dengan JPRI yang dibentuk BITRA, TURC mendorong dan mengadvokasi hadirnya regulasi di level Kementerian Ketenagakerjaan tentang perlindungan pekerja rumahan. Para pekerja rumahan mayoritas adalah perempuan miskin. TURC mencoba mengarahkan mereka dengan melakukan pemetaan hasil-hasil produksi yang selama ini sudah dikelola dan merupakan kearifan lokal atau produk unggulan



Andriko Otang
Direktur TURC

wilayah mereka masing-masing. TURC mendampingi mereka dalam pemasarannya dengan menggunakan *platform e-commerce* agar pangsa pasar mereka lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Andriko Otang, Direktur TURC.



Mike V. Tangka
Sekjen
Koalisi Perempuan
Indonesia

Koalisi Perempuan Indonesia, telah lama mengadvokasi perubahan UU perkawinan, di luar isu perkawinan anak. Sejak tahun 2017 setelah membuat kajian dan rekomendasi hukum yang diajukan kementerian terkait, bersama dengan jaringan bernama Koalisi 18+, KPI mengajukan *judicial review* kedua. Walau *judicial Review* kedua ini berhasil diterima walau sebagian, parlemen menyetujui palu mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun di akhir tahun 2019.



**Tri Hastuti Nur
Rochimah**
AISYIYAH

Meningkatkan Akses Perempuan ke Layanan Menuju Pembangunan berkelanjutan dan Inklusif.

Isu kesehatan reproduksi adalah isu yang marginal karena fungsi reproduksi melekat pada diri perempuan, mengandung ketabuan, banyaknya mitos baik dari sisi agama, interpretasi agama dan budaya. Hal ini menjadi tantangan yang berat, untuk membangun kesadaran pada perempuan bahwa perempuan itu memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara terkait kesehatan reproduksinya. Aisyiyah yang diwakili oleh Ibu Tri Nasturi Nur Rochimah menyampaikan, Aisyiyah melakukan pendekatan komprehensif dan partisipatif dalam melakukan edukasi. Membongkar kesadaran perempuan berhak hidup sehat, berhak mendapatkan informasi yang terkait dengan kesehatan reproduksinya. Aisyiyah juga melakukan pendekatan kepada para suami yang menjadi mitra perempuan untuk mendorong dan mendukung perempuan ketika menjalankan peran reproduksinya.



Foto-foto: Dok. Program MAMPU



Herna Lestari
Ketua
Yayasan Kesehatan
Perempuan

Sedangkan Yayasan Kesehatan Perempuan bersama 15 organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K) bergerak bersama untuk mengatasi kesehatan reproduksi, salah satunya melalui sosialisasi hasil penelitian dan pengumpulan data di masing-masing wilayah kerja ke 15 OMS yang tergabung dalam JP2K ini kepada pemangku kepentingan atau pengambil keputusan juga akademisi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Herna Lestari, Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan.



Nina Zulminarni
Direktur
Yayasan PEKKA

Pada sesi ini, Ibu Nina Zulminarni Direktur Yayasan PEKKA menyampaikan pencapaian PEKKA yang didukung oleh Program MAMPU yaitu Klik Pekka. Klik Pekka adalah suatu inisiatif

atas keprihatinan masyarakat yang tereksklusi dari layanan perlindungan sosial oleh karena tidak tercatatnya mereka dalam data nasional. Termasuk perempuan kepala keluarga dan kelompok disabilitas.

Forum Pengada Layanan (FPL) adalah mitra strategis Komnas Perempuan. FPL mendirikan komunitas-komunitas untuk melakukan diskusi, membedah diskriminasi mempelajari bagaimana pemenuhan hak perempuan. *Champion* dari masing-masing komunitas tersebut dilatih untuk menjadi paralegal komunitas yang akan menjangkau para perempuan korban kekerasan di tingkat basis kawan-kawan komunitas bisa lebih merakyat dalam upayanya menangani kekerasan terhadap perempuan di masyarakat.

Dari program ini dipetik pelajaran utama yaitu perlunya keberlanjutan dengan penguatan dan menggunakan jaringan organisasi masyarakat sipil yang telah ada. Selain itu pentingnya kerja kolaborasi atau kerja kolektif, kolaborasi yang tercipta mungkin tidak akan terlihat hasilnya dalam waktu dekat namun percaya suatu hari nanti kita akan menjemput kesetaraan dan mewujudkan dunia yang ramah bagi perempuan karena “Perempuan Mampu, Indonesia Maju”.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

Tradisi “Culik Perempuan” di Sumba

Bagian I



Oleh **MARTHA HEBI**

Bawa lari perempuan untuk dijadikan istri cukup dikenal dalam tradisi di Sumba. Ini adalah jalan pintas untuk memperistri seorang perempuan idaman dengan cara menculiknya. Seorang perempuan lajang dengan beberapa rekannya pergi ke pasar atau menonton keramaian di kampungnya. Tiba-tiba segerombolan laki-laki yang tak dikenal menangkap dan membekapnya, melarikan dia dengan kuda atau kendaraan bermotor yang

sudah disiapkan. Zaman dulu prosesi ini disertai sepasukan pengawal berkuda dengan senjata parang dan tombak, siap berperang. Siapa yang diperangi? Pihak yang ingin merebut kembali si perempuan dari tangan mereka.

Perempuan lajang tadi dibawa ke rumah keluarga laki-laki untuk dijadikan istri. Meskipun korban menjerit dan meronta-ronta minta tolong, biasanya tidak ada warga yang memberi bantuan. Sebab, pemandangan tersebut dianggap sebuah kebiasaan. Lazim terjadi sehingga tidak tampak aneh. Orang hanya berkata, “Ada yang bawa lari perempuan.” Kelanjutannya adalah

“

Selain tidak etis, *yappa maradda* juga melanggar Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak serta UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa kasus, ada anak di bawah umur yang menjadi korban,”

Salomi Rambu Iru

Foto: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

urusan adat. Keluarga lelaki akan mengutus juru bicara (*wunang*) menemui keluarga perempuan, memberitahu anak perempuan mereka telah ‘dibawa lari’ dan berada di rumah keluarga laki-laki. Urusan adat digelar sebagai jalan keluar.

Yappa Maradda

Sampai sekarang kebiasaan ‘bawa lari perempuan’ ini masih sering dilakukan di beberapa wilayah di Sumba. Ambil contoh di kalangan masyarakat Anakalang di Kabupaten Sumba Tengah, yang disebut dengan istilah *yappa maradda*. Cerita di atas digolongkan sebagai

yappa maradda. Ada pula *palai ngiddi mawini*, namun substansinya berbeda. Dapat dikategorikan sebagai “kawin lari” antara sepasang kekasih karena cinta terlarang. Orang tua salah satu pihak, biasanya pihak perempuan, tidak menyetujui hubungan mereka. Jalan pintas diambil. Sang kekasih dibawa ke rumah keluarga laki-laki atas kesepakatan berdua. Biasanya keluarga laki-laki akan mengirim *wunang*, memberitahukan keberadaan anak perempuan mereka. Urusan adat akan ditempuh.

Tradisi *yappa maradda* dan *palai ngiddi mawini* masih menjadi persoalan sosial yang menonjol di Sumba Tengah, meskipun banyak pihak telah menentangnya. *Yappa Maradda* ditentang karena mengandung kekerasan terhadap perempuan, sementara *palai ngiddi mawini* mensyaratkan kematangan sosial dan ekonomi kedua sejoli membangun rumah tangga. Kerap terjadi pasangan lebih dipengaruhi oleh emosi dan rasa kasmaran.

Salah satu tokoh penentang *yappa maradda* adalah Salomi Rambu Iru (64), atau biasa disapa Mama Salomi. Menurut dia, *yappa maradda* adalah penculikan. Tergolong kriminal karena tindakan menghilangkan kebebasan seseorang dengan paksaan adalah tindak pidana. Karena itu, para pelaku *yappa maradda* bisa dikenai pasal di dalam KUHP. “Selain tidak etis, *yappa maradda* juga melanggar Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak serta UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa kasus, ada anak di bawah umur yang menjadi korban,” jelas Mama Salomi.

Kegelisahan Mama Salomi terjadi sejak ia masih duduk di bangku Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada tahun 1975. Sahabatnya menjadi korban *yappa maradda*. Hati kecilnya memberontak terhadap situasi tersebut. Tapi, apa daya? Adat-istiadat yang mengagungkan dominasi laki-laki masih sangat kental di Sumba. Bahkan sampai saat ini. “Saya sedih, juga marah. Tapi, mau bagaimana lagi. Dulu orang anggap itu hal biasa. Jadi dibiarkan saja,” cetus Mama Salomi yang tinggal di Waihibur, Sumba Tengah ini.

Kegelisahan ini terus menghantuinya setiap kali ada perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban *yappa maradda*. Kelompok perempuan gereja maupun kelompok tani yang ia ikuti belum menemukan solusi. Bahkan menurut Mama Salomi, sebagian kaum perempuan sendiri merasa hal itu bukan masalah. *Yappa maradda* tidak dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Mama Salomi sendiri adalah 'korban' tradisi. Meskipun bukan korban *yappa*. Dirinya menikah dengan anak tantenya atas dasar keinginan orang tuanya. Dia dibelis sejak bayi. Lulus dari SPG, Mama Salomi bekerja di kantor Pemda Sumba Barat. Namun pada tahun 1976, karena harus menikah dengan anak tantenya, Mama Salomi meninggalkan pekerjaannya. Padahal, ia sudah diangkat sebagai pegawai Pemda. "Dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak bisa jadi 'tuan', dia hanya di dapur saja. Akhirnya saya pulang ke kampung untuk urus rumah tangga," ungkapnyanya pelan. Mama Salomi mengabdikan diri sebagai guru Sekolah Minggu juga pengurus PKK di kampungnya.

Pokja Perempuan

Tahun 1992, Yayasan Wahana Komunikasi Wanita (YWKW) terbentuk di Waihibur. Mama Salomi diundang untuk membangun diskusi tentang isu perempuan. Dalam yayasan ini ada kelompok kerja (pokja) yang khusus mengidentifikasi isu kekerasan terhadap perempuan dan mencari solusinya. Semangat Mama Salomi kembali bergelora. "Saya senang sekali ada wadah di mana kita bisa bicarakan hal-hal yang dianggap biasa oleh masyarakat, tapi sebenarnya bukan hal biasa karena menyangkut kekerasan terhadap perempuan," ujar Mama Salomi.

Perempuan kelahiran 6 Maret 1955 ini mulai menyampaikan isu-isu tentang tradisi yang masih melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, namun dianggap hal biasa di masyarakat. Hanya saja, menurutnya, belum ada tanggapan serius. Mama Salomi tidak tinggal diam. Dia terus membawa isu itu dalam perbincangan sehari-hari dengan rekan perempuan, tokoh gereja atau siapa saja yang dia rasa bisa diajak berdiskusi. Lama-kelamaan satu-dua orang mulai mendengar dan mendukungnya. Kepada mereka ini Mama Salomi terus membangun diskusi dan memberi penguatan.

Tak peduli ia dicap aneh karena melawan arus.

Tahun 1998, Pokja Perempuan Yayasan WKW dikukuhkan menjadi Forum Perempuan Sumba (Foremba) yang mempunyai kekuatan hukum. Mama Salomi dipilih menjadi direktur. Geraknya mulai lebih leluasa karena ada lembaga yang menaunginya secara resmi. Ia giat membangun jejaring. Tidak hanya di Waihibur, tetapi sedaratan Pulau Sumba. Sosialisasi tentang penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin gencar dilakukan.

Foremba menarik perhatian masyarakat. Kesadaran warga mulai terbuka. Sebagai komunitas yang secara khusus berkecimpung dengan isu perempuan, informasi mulai mengalir ke Foremba. Terutama warga melaporkan tentang KDRT dan *yappa maradda*. Meskipun akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan, kehadiran Foremba sudah memberikan dampak positif. "Orang mulai mempersoalkan *yappa maradda*. Juga kekerasan dalam rumah. Meskipun diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi ini sudah langkah maju buat Foremba," kata Mama Salomi.

Laporan tidak hanya datang dari sekitar desanya di Sumba Tengah, namun juga dari Kodi (di Kabupaten Sumba Barat Daya), Lamboya (Sumba Barat) dan Sumba Timur. "Kami pernah kasih turun perempuan yang dibawa lari ke Desa Manggani di Kodi. Ada juga peristiwa perempuan dari Loli, di *yappa* oleh orang Lamboya. Kami kasih turun juga. Kalau di Sumba Timur, kasus KDRT. Kami bangun hubungan baik dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Saya juga bersyukur ada undang-undang dan aturan lainnya. Jadi, kami bisa bilang ke pelaku bahwa dia sedang melawan hukum," kata perempuan tiga anak ini.

Korban Masih Berjatuh

Meskipun telah ada beberapa undang-undang, namun korban masih terus berjatuh. Perempuan dan anak perempuan masih menjadi korban. "Ini terjadi karena semua pihak belum bergerak seiring-sejalan. Seringkali perempuan dan anak perempuan masih diperlakukan sebagai komoditi. Ada saja pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara ekonomi. Ambil contoh para pelaku *yappa* yang dibayar sesuai perjanjian yang sudah disetujui oleh pihak laki-laki. Jadi ini bisnis sudah," kata dia.



Tahun 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Mama Salomi seperti mendapatkan tambahan amunisi. Dia terus bersosialisasi tentang penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga untuk melindungi perempuan dan anak. Ia mengedukasi warga untuk membuat laporan secara resmi ke Foremba jika menemukan kekerasan terhadap perempuan di tengah masyarakat.

Langkah Mama Salomi tidak mulus. Ia seringkali disindir, mendapat umpatan, bahkan diancam. Apalagi jika pelaku dan keluarganya ia kenal. “Yang berat itu kalau ternyata pelaku adalah keluarga sendiri. Saya dicap melawan mereka. Kita orang Sumba ini di mana-mana ada keluarga. Ditambah lagi karena hubungan kawin-mawin, maka bisa saja kita kenal itu orang yang bikin masalah,” ujar Mama Salomi.

Menurut Mama Salomi, kasus *yappa maradda* menjadi rumit ketika adat sudah masuk ke dalamnya. Mediasi dan intervensi hukum sering tidak diindahkan. “Kalau seorang perempuan korban *yappa maradda* sudah masuk ke rumah adat keluarga laki-laki pelaku, dan si korban sudah disambut dengan ritual adat,

Mama Salomi Rambu Iru (Kanan) dan rekannya Mama Maria (Kiri).

Sumber: <http://hjf-ringan.blogspot.com/2011/08/forum-perempuan-sumba.html>

urusannya menjadi sulit. Ada berbagai aturan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di sini,” ujarnya.

“Tahun 2017 juga, saya pernah bantu kasus *yappa maradda*. Korbannya sarjana, pelakunya juga sarjana. Ini nona dorang sudah dikasih naik ke rumah. Sudah pukul gong. Karena nona dan orang tua tidak setuju, ada keluarga yang beri tahu saya. Kita koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah. Akhirnya nona bisa pulang kembali ke orang tua,” cerita Mama Salomi.

Pada beberapa kasus *yappa maradda* yang ia selesaikan, ada surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak, disaksikan aparat keamanan. Isinya adalah tidak melanjutkan urusan adat dan perempuan dikembalikan kepada keluarganya. Mama Salomi sendiri merasa heran meski sudah begitu banyak kebijakan perlindungan perempuan dan anak, namun tetap saja *yappa* berulang. “Saya tidak tahu

persis kenapa orang tetap nekat buat ini. Padahal, ada hukuman bisa masuk penjara,” kata dia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (serta perubahannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014) dan sejumlah kebijakan lainnya tentang perlindungan perempuan dan anak, tidak menjamin kasus yappa ini berhenti. Hingga tahun 2018 masih ada beberapa peristiwa *yappamaradda*.

Bergerak Bersama

Dalam menyelesaikan kasus-kasus perempuan dan anak, tidak jarang Mama Salomi harus menggunakan dana sendiri. Baginya ini adalah bagian dari cita-cita pribadinya agar semakin sedikit perempuan yang menjadi korban ketidakadilan. Mama Salomi optimis akan semakin banyak orang yang berdiri bersama para korban. “Banyak yang peduli sekarang. Ada pihak pemerintah, ada LSM, gereja, ada pribadi. Ya saya harap peduli bukan hanya jatuh hati tapi ada bukti misalnya kebijakan, kampanye bersama, sepakat bersama ada perubahan dalam tatanan adat kita,” kata perempuan yang sehari-hari bertani sayur ini.

Hal lain yang sedang diperjuangkan Mama Salomi adalah hak waris tanah bagi anak perempuan di Sumba Tengah. Dalam tradisi Sumba, seorang anak perempuan dianggap sebagai pihak yang ‘keluar’ dari keluarga sehingga tidak mendapatkan warisan.

Baku Atur dalam Yappa

Ruke Dedu, tokoh adat dan *wunang* (juru bicara) dari Desa Malinjak, Sumba Tengah mengatakan yappa tidak sembarang dilakukan. Harus ada hubungan kekerabatan antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, yakni pihak perempuan dalam adat setempat merupakan pihak yang pantas untuk dinikahi. Misalnya ayah dari perempuan bersaudara atau memiliki hubungan keluarga dengan ibu dari keluarga laki-laki (pelaku). Istilahnya, anak om (paman) dari pelaku. Dalam adat Sumba secara umum, memperistri anak om adalah perkawinan yang diharapkan.

Reku menambahkan bahwa dalam tradisi di Sumba Tengah, *yappa marada* bisa dibagi dua. Pertama, orang tua kedua belah pihak

telah bersepakat menikahkan anak-anak mereka. Namun rencana tersebut tidak diketahui anak perempuan dan sama sekali tidak berhubungan dengan si laki-laki. Kedua, anak perempuan dan kedua orang tuanya tidak tahu tentang niat ini. Hanya keinginan sepihak dari keluarga laki-laki.

Jika korban sudah berada di rumah keluarga laki-laki, *wunang* diutus memberi tahu keluarga perempuan bahwa anak mereka telah dibawa ke kampung pihak laki-laki. *Wunang* biasanya membawa seekor kuda dan sebilah parang untuk diserahkan kepada orang tua perempuan. Kuda dan parang bermakna pemberitahuan bahwa anak perempuan ada di keluarga laki-laki yang akan dipinang menjadi istri. “Ini apabila proses yappa dilakukan di jalan, bukan di rumah korban,” terang Reku Dedu.

Namun jika yappa dilakukan di rumah perempuan, maka keluarga laki-laki akan mengikat seekor kuda di tiang rumah. Bila ada keluarga perempuan yang “mengejar” para pelaku yappa, maka mereka akan diberi sebilah parang oleh pihak lelaki. Jadi menurut Reku Dedu, perlu persiapan matang untuk yappa perempuan. Selain persiapan adat, pembagian tugas sudah dilakukan dengan matang: Siapa yang akan menangkap, memuat, kendaraan mobil atau kuda, kapan dilakukan, dan di mana? “Keluarga laki-laki harus siap baik-baik. Memang ada orang yang biasa dipakai untuk tukang yappa. Kalau keluarga perempuan kejar, dia sudah yang tugas menghadapi mereka,” terangnya.

Biasanya saat akan naik ke rumah adat keluarga laki-laki, perempuan akan diperciki dengan air. Tujuannya agar rumah tangga yang akan dibangun terberkati. Meskipun juga ada yang menafsirkan air tersebut mempunyai kekuatan magis agar si perempuan luluh dan mengiyakan seluruh keinginan keluarga laki-laki. “Kalau sudah pukul gong, tidak bisa kasih turun sudah. Satu kampung sudah kumpul, tikam babi. Makan dan minum sama-sama. Jadi dianggap sah sudah. Memang sekarang sudah ada yang dikasih turun kembali. Ada aparat yang bantu keluarga perempuan,” kata Reku Dedu. (Bersambung)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis, dari Komunitas Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba, dan tinggal di Waingapu Sumba Timur. Artikel ini bersumber dari <https://pgi.or.id/melawan-tradisi-culik-perempuan-di-sumba/>

MELIBATKAN MASYARAKAT & UNIT LAYANAN DASAR DALAM PERENCANAAN KAMPUNG

Oleh **HALIA ASRIYANI**

“Gagal dalam membuat perencanaan artinya merencanakan kegagalan.”

Musa Kamudi, Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Manokwari Selatan saat tengah memberi sambutan pada kegiatan Workshop Sinergi Perencanaan di Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan pada Oktober 2020 lalu.

Perencanaan memberikan pandangan bagi kampung mengenai tindakan apa yang harus dilakukan untuk tercapainya tujuan. Namun kita seringkali menemukan perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak menjawab persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Bahkan tak jarang pula program yang dihasilkan dari perencanaan tersebut sama sekali tidak dapat diterapkan di lapangan. Persoalan ini terjadi salah satunya karena dalam proses perencanaan tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Termasuk pula dalam menyusun perencanaan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Akan sulit membuat perencanaan tanpa mendengarkan pendapat atau mengetahui masalah yang tengah dihadapi oleh Puskesmas maupun sekolah yang menjadi unit layanan dasar masyarakat.

Perencanaan yang baik diyakini merupakan dasar yang kuat bagi upaya peningkatan atau pembangunan. Hal ini berlaku untuk semua level dan semua sektor. Ini juga berarti perencanaan kampung, perencanaan Puskesmas, dan perencanaan sekolah, termasuk di dalamnya. Pemerintah kampung, Puskesmas dan sekolah adalah merupakan target utama dari upaya peningkatan kapasitas dalam program KOMPAK-LANDASAN dalam memastikan tercapainya tujuan besar program yaitu seluruh masyarakat di Papua dan Papua Barat memperoleh akses bagi layanan dasar yang lebih baik.

Apa itu sinergi perencanaan dan kenapa harus bersinergi?

Untuk menyederhanakan dalam memahami penerapan “sinergi” dalam program KOMPAK-LANDASAN, maka sinergi dimaknai sebagai kerja sama antar unsur, lembaga, atau kelompok berbeda dalam hal ini kampung, Puskesmas dan sekolah dasar, yang sengaja diarahkan untuk saling mengisi dan melengkapi guna mencapai hasil yang lebih baik dibanding dikerjakan sendiri-sendiri. Dalam kaitannya dengan perencanaan, maka sinergi perencanaan adalah

kerja sama antar unit-unit pemerintahan, termasuk unit layanan, untuk saling mengisi dan melengkapi di dalam membangun sebuah rencana agar terjamin sinergi pelaksanaan pelayanan dasar khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian rencana yang disusun unit-unit yang berbeda, yang beroperasi di wilayah yang sama, memiliki keterhubungan yang saling mendukung dalam mengatasi permasalahan.

Kehadiran unit layanan dasar (Puskesmas dan sekolah) dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kerja unit layanan tersebut berada. Keberhasilan unit layanan melakukan fungsinya dalam pemberian layanan yang bermutu berarti yang diuntungkan adalah masyarakat yang dilayani. Upaya dari unit layanan akan memberi hasil lebih efektif bagi masyarakat, manakala masyarakat dan pemerintah kampung juga turut melakukan peran mereka yang tidak dapat dilakukan oleh unit layanan, untuk mendukung tercapainya hasil yang diharapkan.

Landasan Hukum

Pelayanan dasar ditempatkan sebagai prioritas dalam belanja, penyelenggaraan pemerintahan, program dan kegiatan baik di pemerintahan daerah dan pemerintahan kampung. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, termasuk di dalamnya kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

Karena memiliki prioritas yang sama, yaitu pelayanan dasar, maka perlu ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung di dalam pelaksanaan prioritas tersebut dan ini sejalan dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 dimana tujuan atau upaya-upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintah harus bersinergi. Kemudian, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 2 bahwa sebuah sistem perencanaan pembangunan didesain bertujuan untuk menjamin terciptanya, salah satunya, sinergi antar fungsi pemerintah, pusat dan daerah atau dengan kata lain desain sebuah perencanaan untuk menjamin terciptanya sinergi antar fungsi pemerintah.



Di dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terkait tata cara perencanaan menjelaskan bahwa agar sinergitas pembangunan atau sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan terjadi maka perlu pelibatan berbagai pemangku kepentingan di dalam perumusan masalah dan analisis isu strategis dan penyalarsan program dan kegiatan antar perangkat daerah. Kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintah atau antara pusat dan daerah harus bersinergi. Permendagri tersebut juga menjelaskan bahwa sinergi terjadi juga semenjak penyusunan rencana dengan



Foto: Dok. LANDASAN/Yayasan BaKTI

sama kemudian mengaitkan beragam usulan dari kampung, Puskesmas dan sekolah sehingga bisa bertemu pada satu titik.

Memulai proses perencanaan, pengkajian keadaan kampung dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi kampung. Proses ini penting sebelum menentukan permasalahan. Hal ini agar masalah yang diidentifikasi bisa sesuai dengan data dan kondisi yang benar-benar terjadi di kampung. Dasar informasi yang sama dalam melihat permasalahan akan menghasilkan analisis masalah yang lebih akurat. Pengkajian keadaan kampung ini dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan alat kaji yang dapat ditentukan sendiri seperti sketsa kampung, kalender musim maupun diagram kelembagaan.

Hasil dari pengkajian keadaan kampung ini kemudian memunculkan daftar masalah dan potensi yang ada di kampung. Tahap selanjutnya adalah memikirkan bersama beberapa pilihan solusi atas masalah yang telah teridentifikasi. Proses ini dilakukan secara partisipatif sehingga benar-benar berasal dari masyarakat. Selanjutnya adalah membuat prioritas dari solusi-solusi yang telah dirembukkan. Proses ini

juga nantinya akan membantu untuk menentukan usulan kegiatan yang menjadi prioritas selanjutnya dapat menjadi program alternatif di tahun pertama yang diusulkan dalam RKKP.

Proses pengkajian keadaan kampung ini juga berlangsung di Puskesmas dan sekolah. Menggunakan data kesehatan dan pendidikan yang mereka miliki, Puskesmas dan sekolah mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang mereka miliki. Hasil identifikasi ini selanjutnya akan dipaparkan dalam forum musyawarah kampung untuk mengklarifikasi sekaligus menyepakati masalah secara bersama-sama. Kemudian hasil dari tanggapan masyarakat akan menjadi usulan untuk dimasukkan dalam perencanaan Puskesmas dan sekolah dasar.

Kita telah mengetahui perlunya melibatkan masyarakat dan unit layanan dasar dalam perencanaan kampung, berikut pula mekanisme yang dapat diterapkan untuk menyusun perencanaan yang partisipatif dan bersinergi dengan unit layanan kesehatan dan pendidikan. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pun sudah mengamanatkan tentang pelibatan berbagai



Proses estetika membuat *slideshow* memang seru, tapi Anda juga mesti memikirkan informasi, ide, atau gagasan yang ingin disampaikan di dalamnya. Kadang, kita terjebak dalam kedua hal tersebut, sehingga hasil penggarapan *slide show* jadi tak seimbang.

Bingung karena hari H presentasi semakin dekat? Buat Anda yang ingin membuat *slideshow* keren namun tetap informatif, ikuti cara ampuhnya sebagai berikut.

5 CARA MEMBUAT *SLIDESHOW* VIDEO YANG KEREN DAN INFORMATIF

Oleh **RIESTY WULANDARI**

Membuat *slideshow* memang mudah dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Namun, sudahkah Anda tahu cara menciptakan hasil yang keren dan berbeda dengan video lain? Cari tahu di sini!

Berdasarkan penjelasan resmi, *slideshow* merupakan rangkaian gambar gerak yang ditujukan untuk berbagai macam keperluan. Namun sampai saat ini, *slideshow* identik sebagai alat presentasi seperti kerja hingga tugas sekolah.

Keseruan membuat *slideshow* biasanya berlangsung saat merancang tampilan visual sebebas mungkin menggunakan elemen yang ada. Baik deskripsi berupa teks, pemilihan *font*, dan bentuk unik lainnya, bisa Anda masukkan sesuai kebutuhan.

Cara Membuat *Slideshow* Keren dan Informatif



1 Pilih *Platform* Desain Paling Tepat

Kunci membuat *slideshow* yang keren dan informatif adalah memilih *platform* desain paling tepat. Ya, Anda mesti memilih satu *platform* yang memang mudah dioperasikan dengan sejuta fitur menarik, mulai dari pustaka foto hingga elemen unik lainnya.

Platform desain yang mendukung, biasanya dilengkapi ribuan video stok gratis, jutaan foto stok gratis, dan ratusan trek musik gratis. Ada pula rangkaian gambar premium, trek musik, serta cuplikan video menarik.



2 Libatkan Elemen Audio dan Visual Dinamis

Selain gambar, libatkan elemen klip video, ikon, atau teks yang dinamis. Jadi, sekalipun hanya *slideshow*, Anda dapat membuatnya lebih hidup dan menghibur para audiens.

Coba tambahkan unsur video sepanjang 30 detik pada beberapa *slide*. Kami merekomendasikan penggunaan klip video pendek atau gambar untuk merepresentasikan pesan secara visual.



3 Tampilkan Kata-Kata yang Menggugah

Tak hanya seputar desain, Anda juga bertugas menampilkan kata-kata yang menggugah dan mampu menarik audiens untuk bertanya serta berpendapat. Tak perlu panjang, yang penting tepat sasaran dan mampu merangkum keseluruhan maksud dalam *slide show* tersebut.

Pilih *font* yang paling sesuai dengan konteks video *slide show*. Jika formal, gunakan *font* dengan format serius. Jika lebih santai, Anda bisa mengombinasikan beberapa *font* asal tidak terlalu banyak. Atur pula tata letak serta besar atau kecil *font* dalam setiap *slide*.



4 Lengkapi dengan Data Visual Menarik

Jika ditujukan untuk presentasi, tak lengkap rasanya bila kita tidak melibatkan data visual seperti tabel infografik dalam sebuah *slide show*. Beberapa jenis yang sering dipakai, antara lain infografik statistik, infografik informasi, infografik *timeline*, infografik hierarkis, dan infografik daftar.

5 Tetap Sederhana dan Mudah Dipahami

Setelah menerapkan cara-cara di atas, saatnya kita memahami bersama bahwa produk visual yang baik adalah produk yang sederhana dan mudah dipahami. Meski mengusung aspek estetika tingkat tinggi, namun jangan lupakan cara penyampaian yang ringan dan gampang dimengerti.

Jangan biarkan produk presentasi kita terjebak dalam konsep slide yang rumit, tidak merunut, dan kurang informatif. Sisihkan *space* kosong agar tidak penuh di seluruh bagian. Hindari desain-desain yang tidak perlu pada gambar.

Itulah tadi cara membuat *slideshow* yang keren namun tetap informatif. Ciptakan hasil sebaik-baiknya agar mudah dinikmati oleh seluruh kalangan. **Selamat mencoba!**

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email riesty@canva.com

NAMA PROGRAM AKAN BERBEDA TETAPI NAMA ANAK AKAN TERUS ADA

Oleh **JIMMY YIKWA**

Jhon Bangga Papua Wenda adalah nama seorang penerima manfaat program Bangun Keluarga Dan Generasi Papua Sejahtera, atau disingkat BANGGA PAPUA untuk Kabupaten Lanny Jaya. Lanny Jaya adalah salah satu kabupaten percobaan selain Kabupaten Paniai dan Asmat. Lanny Jaya yang terletak di pegunungan tengah bagian timur sudah mencatatkan 3.354 anak penerima manfaat di tahun 2018 dan 9.192 anak penerima manfaat di tahun 2019.

Tahun 2018 adalah tahun pertama untuk proses pendaftaran Calon Penerima Manfaat (CPM) di Sekretariat Bersama BANGGA Papua Kabupaten Lanny Jaya yang saat itu beroperasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di Jl. Hom-Hom, Kompleks Kios Surya Wamena. Bapak dari pada anak John Bangga Papua Wenda



Foto: Syaifulah/Yayasan BaKTI

yang bernama Jhonny Wenda adalah salah satu anggota tim *entry data* penerima manfaat atau termasuk anggota Sekber juga.

Di tahun pertama berjalannya program, berkas penerima manfaat yang diproses oleh anggota Sekber Lanny Jaya cukup banyak. Data itu berasal dari 354 kampung se Kabupaten Lanny Jaya. Data yang cukup banyak itu memaksa anggota Sekber untuk begadang memilah data, melakukan verifikasi, dan memasukkannya ke dalam sistem. Saat itu, ibu sang anak sedang menunggu masa persalinan di rumah sakit.

Saat sedang berjibaku dengan data di kantor Sekber, sebuah panggilan telepon masuk ke *handphone* Jhonny. Telepon dari istrinya yang mengabarkan anaknya telah lahir dengan selamat dan berjenis kelamin laki-laki.

“Wa, wa, wa,” begitu kata si bapak. Sebuah kata dalam bahasa Lanny yang menunjukkan rasa syukur dan terima kasih. Saat itu juga si bapak memutuskan untuk memberi nama anaknya Jhon Bangga Papua Wenda.

Pada akhirnya kami sebagai teman kerja memberikan ucapan selamat kepada Jhonny atas lahirnya putra kedua itu.

Kami pun bertanya, “Kenapa anak bapak diberi nama sama dengan program BANGGA Papua?”

Si bapak menjawab, “Alasan pertama karena saya sebagai bapaknya sedang bekerja demi generasi emas Papua Kabupaten Lanny Jaya saat ini di sini, dan di momen kesibukan saya dengan program ini, Tuhan memberikan saya anak. Alasan kedua karena anak saya lahir bersamaan dengan lahirnya program BANGGA Papua lewat ide seorang pemimpin yang bijaksana untuk generasi emas oleh bapak Lukas Enembe, S.IP, M.H. Sekali lagi program ini membantu sekali untuk sumber daya manusia Papua, lebih khusus generasi muda Lanny Jaya agar anak lebih sehat dan pintar lewat minuman dan makanan bergizi nanti.”

Alasan itulah yang membuat Jhonny Wenda memberi nama BANGGA Papua kepada anaknya. Alasan yang membuat kami kaget, tapi mau tidak mau mengangguk mengakuinya.

Lewat momen ini, si bapak sangat berterima kasih kepada bapak Gubernur Papua, anggota Sekber BANGGA Papua Provinsi Papua, dan mitra pembangunan yang sangat proaktif dalam

memberikan pelatihan secara terus menerus kepada anggota Sekber BANGGA Papua Kabupaten Lanny Jaya. Menurutnya, program ini sangat bagus karena selama ini dia sebagai masyarakat kecil tidak pernah sama sekali memegang uang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tapi sekarang dia bisa langsung mengambilnya sendiri di Bank Papua dan digunakan untuk kebutuhan anaknya.

Program ini mungkin tidak akan ada selamanya, karena pemimpin berikutnya mungkin punya program lain yang berbeda. Tapi, kami semua tahu bahwa di Lanny Jaya ada anak bernama Jhon Bangga Papua Wenda yang akan tetap ada sampai selamanya. Sebagai kenangan bahwa suatu masa ada Gubernur Papua yang punya program bagus yang menysar perkembangan anak-anak generasi emas Papua. Harapan kami, program bagus ini akan terus dilanjutkan oleh gubernur atau pemimpin Papua berikutnya agar anak-anak Papua bebas dari penyakit dan tumbuh menjadi generasi emas bagi Papua. Amin.

Jimmy Yikwa, adalah anggota Sekber BANGGA Papua Kabupaten Lanny Jaya, sehari-harinya bertugas di Bappeda Kabupaten Lanny Jaya. Jimmy Yikwa adalah salah satu anggota Sekber BANGGA Papua yang mendapatkan pendampingan dari mitra pembangunan KOMPAK-BaKTI yang salah satunya adalah pendampingan mengisi konten di *website* BANGGA Papua. Tulisan ini adalah hasil pendampingan kepada para kontributor *website*.

Sejak 2018, KOMPAK-BaKTI mendampingi anggota Sekber BANGGA Papua di Provinsi Papua dan kabupaten implementasi program dengan upaya peningkatan kapasitas di bidang komunikasi. Pendampingan dilakukan lewat pelatihan komunikasi, diskusi tentang strategi komunikasi, dan mentoring.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan dan informasi tentang BANGGA Papua dapat disimak di *website* BANGGA Papua pada link <https://info.bangga.papua.go.id>



Ekologi Terjaga Warga Sejahtera dari Hutan Desa Labbo

Oleh **WAHYU CHANDRA**

Pagi itu, kami berkendara menyusuri jalan yang mendaki dan berkelok. Tujuannya adalah sebuah desa yang berada di dataran tinggi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Namanya Desa Labbo. Di sepanjang jalan kadang kami temui warga yang sedang menjemur kopi, yang merupakan salah satu komoditi unggulan desa itu.

Desa Labbo adalah desa yang subur dikelilingi hutan yang masih terjaga dengan baik. Di dalam kawasan hutan, selain kopi, warga juga menanam cengkeh atau mengambil rotan. Selain itu ada juga petani pengambil madu, baik dilakukan secara individu ataupun kelompok.

Sebagian kebun warga memang berada di dalam kawasan hutan. Jika dulu mereka melakukannya secara ilegal, kini mereka tercatat



- Kehadiran Hutan Desa melalui skema Perhutanan Sosial di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mendorong produktivitas masyarakat sehingga membantu meningkatkan perekonomian desa.
- Hutan Desa juga memberi manfaat ekologi karena hutan semakin dijaga dan saling mengawasi oleh warga sendiri.
- Pengelolaan Hutan Desa Labbo masih eksis hingga sekarang tak terlepas dari adanya dukungan pemerintah desa, dan pengelolaannya oleh BUMDes.
- Dukungan pemerintah desa antara lain melalui penganggaran baik melalui Dana Desa dan anggaran lain dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga kementerian.

Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.

memiliki hak kelola sejak ditetapkannya hutan tersebut sebagai hutan desa melalui skema Perhutanan Sosial.

Beragam tanaman dan satwa terdapat dalam Hutan Desa Labbo termasuk anoa yang merupakan salah satu satwa endemik Sulawesi. Hutan Labbo juga memiliki sumber air yang melimpah, yang menghidupi dua dusun yang ada di sekitarnya.

Hasri, Ketua BUMDes Labbo yang merupakan pemegang hak kelola Hutan Desa Labbo bercerita bagaimana Hutan Desa bisa memberi manfaat bagi warga, baik secara ekonomi maupun ekologi. “Meski hutan telah dikelola sejak dulu namun dengan ditetapkannya sebagai Hutan Desa maka warga bisa secara nyaman bertani tidak waswas lagi, sehingga produktivitas meningkat karena dikelola secara maksimal,” ungkap Hasri, pertengahan Agustus 2020 lalu.

Secara ekologi, hutan bisa lebih lestari karena kawasan hutan dikelola dengan baik dengan adanya aturan-aturan perlindungan di dalamnya. “Dulu boleh dikata petani melakukan perambahan hutan. Setelah ditetapkan sebagai hutan desa, dari segi perlindungan masyarakat saling mengawasi. Artinya kalau ada yang melanggar maka akan diawasi oleh yang lain sehingga pelestarian hutan berjalan,” jelasnya.

Menurut Hasri, alasan mendorong hutan Desa Labbo sebagai Hutan Desa karena secara historis masyarakat memang dari dulu sudah masuk dalam kawasan hutan, memanfaatkan hutan secara legal, bahkan melalui penebangan pohon. “Melihat ada program pemerintah melalui skema perhutanan sosial hutan ini diusulkan sebagai Hutan Desa. Masyarakat kemudian dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan,” katanya.

Pengajuan Hutan Labbo sebagai Hutan Desa diinisiasi ketika Menteri Kehutanan MS Kaban berkunjung ke Desa Campaga Bantaeng di tahun 2007. Bupati Bantaeng yang ketika itu dijabat Nurdin Abdullah kemudian mengajukan tiga lokasi untuk Hutan Desa, yang salah satunya Desa Labbo.

Desa Labbo sendiri yang luasannya kurang lebih 342 hektar, diusulkan prosesnya dimulai pada tahun 2007 dan baru ditetapkan tiga tahun kemudian, tahun 2010. “Di dalam proses ini beberapa orang dilibatkan dalam perencanaan, diskusi di tingkat dusun, kemudian masyarakat diajak membuat perencanaan hutan ini mau dimanfaatkan seperti apa, supaya bisa diperoleh manfaat secara ekonomi,” jelas Hasri.

Di dalam Hutan Desa Labbo potensi yang ditemukan antara lain kayu, air, rotan, anggrek, kopi dan wisata. Berdasarkan potensi yang ada itu kemudian dibagi menjadi tiga blok, Blok Batu Leppa, Saroangin, dan Patiroang, yang kemudian dibagi menjadi dua zona pemanfaatan, yaitu zona lindung dan zona pemanfaatan.



Panorama Hutan Desa Labbo, Tampobulu, Bantaeng, Sulsel. Hutan Desa Labbo ditetapkan sebagai Hutan Desa melalui skema Perhutanan Sosial sejak 2010 lalu meliputi kawasan hutan seluas 342 hektar yang dibagi dalam 3 blok yaitu Blok Batu Leppa, Saroangin, dan Patiroang, serta 2 zona, yaitu Zona Lindung dan Zona Pemanfaatan.
Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.

Pengelolaan Hutan Desa ini diserahkan kepada BUMDes Desa Labbo dengan hak kelola selama 35 tahun. Di dalam BUMDes ini terdapat Unit Usaha Hutan Desa yang di bawahnya terdapat kelompok masyarakat pengelola hutan.

“Dalam pelaksanaannya kami memiliki standar operasional prosedur, ada aturan-aturan termasuk kewajiban masyarakat membagi hasil panen 20% per tahun. Aturan lain adalah batasan pemilikan lahan kelola hanya 0,5 hektar per kepala keluarga.”

Untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti rotan terdapat pengaturan tersendiri. Sementara untuk madu tidak diatur secara spesifik, akan tetapi masyarakat bisa memanen madu yang ada di dalam kawasan hutan.

Dukungan Pemerintah Desa

Pengelolaan Hutan Desa Labbo masih eksis hingga sekarang tak terlepas dari adanya

dukungan pemerintah desa, apalagi dalam pengelolaannya dilekatkan pada Bumdes. Menurut Sirajuddin, Kepala Desa Labbo, semua proses kebijakan terkait pengelolaan Hutan Desa Labbo selalu didorong melalui musyawarah desa. Dalam RPJMDes, Hutan Desa menjadi salah satu item program yang mendapat prioritas.

“Pada reueu RPJMDES untuk tahun 2019-2025 secara khusus mencantumkan bahwa Hutan Desa harus diberi penguatan yang lebih maksimal agar berdaya guna bagi masyarakat. Kita prioritas pada pengolahan kopi yang memang telah dikelola warga dengan luas puluhan hektar. Kopi di Hutan Desa ini beda dengan tempat lain sehingga memiliki ciri khas tersendiri,”katanya.

Menurut Sirajuddin, Hutan Desa Labbo adalah salah satu potensi yang harus memang diberikan *political will* anggaran yang riil tiap tahun dan didorong berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi setelah 10 tahun sejak ditetapkan memang terlihat adanya geliat ekonomi yang lebih dinamis dibanding sebelumnya.

“Karena itu pemerintah desa tak henti-hentinya mendorong kebijakan yang bisa kita harapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar hutan dan mendorong adanya inovasi untuk pengembangan hutan desa.”



Untuk dukungan di RPJMDes, Sirajuddin menilai sudah cukup riil, yang tinggal diterjemahkan melalui program-program yang diusulkan Bumdes sebagai pemangku anggaran.

“Untuk ‘angka’ saya kira kita ikuti saja dinamika anggaran yang ditentukan pemerintah daerah. Yang pasti bahwa pengelolaan anggaran dan pengelolaan politik anggaran yang akan kita dorong ke Hutan Desa ini bukan hanya dari Dana Desa, tetapi juga dari pemerintah provinsi dan pusat untuk mencoba melihat potensi ini di mana mereka bisa masuk,” katanya.

Beberapa dukungan kegiatan yang sudah diberikan selama ini adalah pelaksanaan pemetaan desa dan pemetaan tata guna lahan, termasuk pemetaan kawasan hutan, yang dilakukan BUMDes kerja sama Balang Institute.

Terkait pengawasan, Pemerintah Desa Labbo melibatkan pengawas internal yaitu Badan Permusyawaratan Desa, yang bersinergi dengan tiga pilar pemerintahan desa, yaitu Pemerintah Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

“Yang kami awasi adalah apakah kemudian hutan ini bisa dimanfaatkan dengan baik atau justru kemudian jauh dari aturan-aturan yang ada. Kami sudah pastikan bahwa pengawasan yang kita

Biji kopi dijemur di jalan Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Bantaeng, Sulse. Kopi merupakan salah satu komoditi pertanian dari hutan desa Labbo yang dikelola dengan skema Perhutanan Sosial. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.

lakukan berjalan dengan efektif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena memang selama ini kami ingatkan dengan pola-pola pengelolaan hutan yang benar dan sesuai dengan regulasi yang ada.”

Tantangan yang dihadapi selama ini adalah akses ke lokasi hutan, baik dalam proses membawa peralatan ke kebun ataupun ketika membawa hasil kebun ke rumah.

“Tetapi kami di pemerintahan desa tak henti-hentinya menyampaikan ke masyarakat mendorong agar masalah ini ke musyawarah desa (musdes). Kalau sudah masuk di musdes maka banyak yang bisa dilakukan untuk kemudian diadvokasi di anggaran desa. Kalau pun tak memungkinkan maka kami akan dorong ke kabupaten, provinsi atau kementerian,” pungkask Sirajuddin.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://www.mongabay.co.id/2020/11/07/ekologi-terjaga-warga-sejahtera-dari-hutan-desa-labbo/>

TANTANGAN PENDIDIKAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI TENGAH PANDEMI COVID-19



Oleh **LATWARNINGRUM ALFIANI YULITA**

M

unculnya virus Corona telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Dilansir melalui Worldometer, terhitung 48.589.395 positif, 34.792.699 sembuh, dan 1.233.216 hingga Kamis malam (Worldometer, 05/11/2020). Virus ini menyebar dengan begitu cepat dan hal ini berdampak kepada semua sektor terutama sektor pendidikan.

Kondisi yang mencekam hadir dan membawa masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain terus bergerak dan melanjutkan hidup. Dibalik kondisi yang sangat mengecam ini, ada tantangan yang seharusnya dilewati. Meneropong dari kondisi tersebut, khususnya untuk dunia pendidikan prosesnya harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi

COVID-19. Oleh karena itu, Kemendikbud menyatakan bahwa untuk belajar yang tadinya dilakukan di sekolah mau tidak mau harus dilakukan dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) guna memutus mata rantai COVID-19. Kondisi ini bisa dapat menguntungkan dan bisa juga menjadi tantangan untuk pendidikan di era 4.0 sendiri.

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, *paidagogia* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Istilah lain berasal

berasal pada Hanover Fair di Jerman pada tahun 2011. Istilah ini dimaksudkan sebagai strategi untuk memitigasi persaingan yang semakin meningkat dengan luar negeri dan untuk membedakan industri-industri di Jerman dan Uni Eropa dengan pasar internasional lainnya. Sebagai proses sejarah kemajuan teknologi manusia, 4.0 pada dasarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari revolusi-revolusi industri sebelumnya (Junaedi, 2019).

Era Revolusi Industri 4.0 mendapatkan respons cepat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pendidikan 4.0 merupakan istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori



dari kata *paedos* yang berarti membimbing atau memimpin. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3, dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (Kristiawan dkk, 2017).

Selain itu, menurut Mahfud Junaedi dalam bukunya, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam (2019), istilah Revolusi Industri 4.0

pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran.

Di awal abad ini, pendidikan mulai berbenah diri untuk meningkatkan kualitas melalui Revolusi Industri 4.0. Telah banyak pelatihan yang membahas pendidikan 4.0. Namun, dalam implementasinya masih banyak guru yang kesulitan dalam mengoperasikan teknologi guna menunjang pembelajaran. Seharusnya, pendidikan 4.0 ini memerlukan tenaga pendidikan yang mengupdate dirinya baik ekonomi, perkembangan pendidikan 4.0, maupun perkembangan teknologi.

Pandemi COVID-19 dapat menguntungkan pendidikan 4.0 untuk pendidik maupun peserta didik yang telah mengerti dengan teknologi digital, sehingga dapat memudahkan mereka ke fase transformasi dari konvensional menjadi daring. Namun, hal ini bisa juga menjadi tantangan besar bagi yang sama sekali belum mengetahui teknologi digital. Kita sendiri mungkin baru menyadari betapa pentingnya penerapan teknologi dalam pendidikan, terutama di tengah pandemi.

Dalam pendidikan 4.0, dibutuhkan keselarasan antara manusia dan teknologi informasi dalam rangka menemukan solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul, serta dapat menciptakan peluang yang kreatif dan inovatif untuk memperbaiki sektor kehidupan. Hal seperti inilah yang mengharuskan guru untuk mau tidak mau mempelajari teknologi guna mentransferkan ilmunya melalui Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara *online*. Tidak hanya pendidik, peserta didik pun diharuskan untuk dapat memahami penggunaan teknologi yang tidak hanya sosial media saja, tetapi juga semua aspek yang menunjang keberlangsungan KBM.

Setelah hampir 8 bulan pembelajaran 4.0 berbasis *online* berlangsung, hal ini telah membuat sebagian besar masyarakat sadar akan satu hal penting, yaitu sebaik apapun teknologi, tidak bisa menggantikan peran seorang guru. Mungkin dahulu murid merindukan libur karena merasa jenuh berada di kelas dari pagi sampai sore hari. Namun, kali ini mereka pasti jauh lebih merindukan kebersamaan dengan guru dan teman-temannya saat di dalam kelas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, peran guru tidak dapat tergantikan oleh apapun karena teknologi yang saat ini kita nikmati hanya untuk mempermudah kegiatan, bukan menggantikan peran dari seorang guru.

Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pendidikan 4.0 kurang optimal karena adanya ketidakberartian teknologi tanpa adanya peran guru. Tanpa guru, siswa akan cepat merasakan bosan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan 4.0 ini, hendaknya guru harus mampu bersinergi dengan teknologi demi mewujudkan pendidikan yang optimal.

Agar bisa menjadi bangsa Indonesia yang maju, kita harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. SDM yang berkualitas menjadi sesuatu hal yang penting dan

menjadi perhatian bersama dalam upaya menciptakan NKRI ini menjadi bangsa yang maju, karena kreativitas dan inovasi menjadi faktor penentu suatu keberhasilan di era 4.0 terlebih saat pandemi COVID-19. Sangat disayangkan, apabila generasi milenial jika hanya bertindak sebagai pengguna yang pasif. Selain menjadi pengguna, generasi milenial harus mampu menjadi pemimpin dalam menghasilkan kreativitas dan inovasi, memiliki wawasan yang lebih luas dalam perkembangan teknologi, dan mengasah kemampuannya dalam menyosong era 4.0 ini. Dengan berpikir kritis dan tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif dapat dilakukan mahasiswa untuk ikut berperan dalam era revolusi industri 4.0 ini.

Selain itu, generasi muda saat ini merupakan aset bangsa. Sudah sepatutnya, jika generasi muda diberikan kebebasan dalam berpikir, karena mereka harus mampu mengembangkan pola pikir dan kreativitas untuk menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa maupun negara. Dan juga, tentunya generasi muda tentunya harus mampu melatih pola pikir dan harus bisa memilah informasi yang benar maupun informasi yang salah, yang semakin mudah tersebar di era pesatnya pertumbuhan teknologi sekarang ini.

Tentang Penulis:

Latwarningrum Alfiani Yulita

Lahir di Bogor dan dibesarkan di Ngawi, Jawa Timur. Orang-orang sering memanggil Latwa atau Alfi. Anak pertama dari pasangan Suwarno dan Sri Mulatsih. Saya memulai pendidikan di TK Al-Mukminun Ngrambe (2005), SDIT Al-Mukminun (2011) dan SMPIT Al-Mukminun (2014) yang merupakan satu yayasan. Lalu melanjutkan di MAN 4 Ngrambe yang sekarang lebih dikenal dengan MAN 4 Ngawi (2017). Dan sekarang, saya melanjutkan pendidikan di UIN Walisongo Semarang Prodi Pendidikan Agama Islam Semester 7. Semoga Allah Swt. melancarkan segala urusan saya dan teman-teman semua. Aamiin ya mujibassailiin. Motto hidup "Kecerdasan bukanlah penentu kesuksesan, namun kerja keraslah penentu kesuksesan yang sebenarnya".

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari <https://suarakebebasan.id/tantangan-pendidikan-era-revolusi-industri-4-0-di-tengah-pandemi-covid-19/>



DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



MALARIA CENTER: UPAYA TERPADU ELIMINASI MALARIA DI PAPUA

Di Papua, tantangan Malaria masih membayangi. Papua masih menjadi salah satu daerah endemis Malaria tertinggi. Menurut catatan Kementerian Kesehatan (2018), jumlah kasus malaria tahun 2017, 90 persennya berasal dari Papua, Papua Barat, dan NTT. Itu berarti, sekitar 73,7 juta penduduk Indonesia hidup di daerah endemis malaria.

Kabupaten Keerom sebagai salah satu kabupaten di Papua dengan angka *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 386 per 1000 penduduk di tahun 2019. Salah satu upaya untuk menekan angka malaria di Keerom adalah dengan belajar dari daerah yang telah berhasil melakukan praktik pengendalian Malaria dengan mereplikasi Malaria Center dari Halmahera Selatan.

Bapak Firmansyah Mustafa (Praktisi Praktik Cerdas Malaria Center dari Halmahera Selatan) saat ini mendampingi Pemerintah Kab. Keerom dalam melakukan upaya terpadu intervensi penanggulangan malaria dengan melibatkan berbagai pihak terkait, Pak Firman berbagi cerita mengenai proses replikasi Malaria Center di Kabupaten Keerom.



KENAPA FILM DOKUMENTER

Dunia semakin visual, teknologi membuat video semakin mudah diakses, ditambah lagi dengan jenis konten yang semakin beragam.

Bagaimana dengan *interest* terhadap video atau film dokumenter? Obrolan seru bersama Arfan Sabran, seorang documentarist dari Makassar, mengupas banyak hal yang menarik, menantang, miris, dan menggembirakan dari dunia dokumenter.



HADIRKAN PENGETAHUAN KE PELOSOK NEGERI

Setiap anak Indonesia berhak atas pendidikan. Sayangnya walaupun sekolah telah dibangun sampai ke tingkat kampung, tidak semua anak bisa mengaksesnya dengan mudah. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil menghadapi tantangan yang lebih besar. Apalagi anak-anak yang usianya lebih muda, usia pra-sekolah.

Tirsa Kailola bersama Hekaleka Maluku menginisiasi beberapa program pelatihan untuk para pendidik PAUD di 3 pulau di Maluku, Pulau Saparua, Pulau Kisar dan Pulau Moa untuk memastikan anak-anak usia pra-sekolah di sana juga bisa mendapatkan pengetahuan yang mumpuni sebagai bekal persiapan sebelum masuk Sekolah Dasar.

Kegiatan belajar secara tatap muka langsung bersama guru PAUD di pulau, terhenti selama masa pandemi ini. Namun berbekal pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti program INSPIRASI (*Indonesia Young Leaders Programme*) selama 6 bulan di Selandia Baru, Tirsa bersama Hekaleka mengembangkan beberapa program pendidikan melalui kelas *online* dan turut terlibat dalam gerakan SaveMaluku, menggalang dana untuk menyediakan peralatan pelindung untuk tenaga medis di Maluku.

Artikel

Pencegahan Perkawinan Anak

Perjuangan berbagai lembaga nirlaba, aktivis, pemerintah, dan organisasi perlindungan anak dalam mewujudkan pencegahan perkawinan anak telah melewati jalan panjang yang penuh kerikil. Ditetapkannya UU no. 16 tahun 2019, yang mengatur batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, seakan membawa angin sejuk dalam napas perjuangan ini. Perubahan batas usia perkawinan memang patut dirayakan mengingat kesulitan yang harus kita lalui untuk mencapainya. Lantas apakah perjuangan kita dalam mencegah perkawinan anak sudah selesai?

Bagi saya, pencegahan perkawinan anak di Indonesia belum dapat dikatakan tuntas hanya dengan penetapan regulasi baru. Studi Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh PUSKAPA bersama BPS dan UNICEF (2020) menunjukkan bahwa perkawinan anak didorong oleh banyak faktor lain di luar kebijakan struktural. Praktik perkawinan anak juga berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, lokasi tempat tinggal anak, dan pengaruh dari tradisi serta agama (PUSKAPA, 2020). Temuan ini menekankan bahwa regulasi saja tidak cukup untuk menekan angka perkawinan anak.

<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/pencegahan-perkawinan-anak>

Referensi



Hak Anak di Mata Media

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama cukup lama dengan *United Nations International Children's Fund* (UNICEF), badan dunia yang memiliki mandat untuk menangani isu anak.

Bagi AJI, ini kerjasama penting karena tema soal anak merupakan topik yang hampir tiap hari muncul di media. Sehingga ada kebutuhan bagi AJI untuk meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan, dan memperbaiki perspektif jurnalis dalam menulis berita soal topik ini. Buku ini berisi kompilasi karya jurnalis terbaik tentang isu anak yang meliputi berbagai daerah di Indonesia.

<https://batukarinfo.com/node/35563>

Peluang

Split-Site Master's Scholarship Program for Civil Servants Working in the Social Sector

The Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS) collaborates with Australia Awards in Indonesia, Gadjah Mada University, and The University of Melbourne to deliver the Split-Site Master's Scholarship Program for civil servants working in the social sector, for the academic year of 2021-2023.

This scholarship program consists of 1 year of study at Gadjah Mada University, Indonesia and 1 year of study at The University of Melbourne, Australia. At the end of study, students will get two degrees, which are Magister Sosiologi and Master of Social Policy.

If you are a civil servant working in the social sector and interested in pursuing higher education in Australia, please register by the latest 15 January 2021.

For more information: <https://batukarinfo.com/news/split-site-masters-scholarship-program-civil-servants-working-social-sector>

Berita Terbaru

SDGs Desa Wujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan

Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan dan membuka acara Rapat Konsolidasi Akhir Tahun Ditjen PKP Tahun 2020 dengan topik SDGs Desa Arahan Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2020-2024 di Jakarta pada Senin (14/12/2020). Saat ini Kemendes PDTT sudah memiliki tatanan yang pasti dalam mewujudkan pembangunan desa dengan mengarahkan ke SDGs desa.

SDGs desa memiliki 18 poin arah tujuan pembangun desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

<https://batukarinfo.com/news/sdgs-des-a-wujudkan-pembangunan-des-a-berkelanjutan>